

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**



**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BIMA**

**TAHUN 2018-2023**

	<b>DAFTAR ISI</b>	
	<b>BAB I</b>	
	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
	<b>BAB II</b>	
	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	14
	<b>BAB III</b>	
	<b>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	22
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	33
	<b>BAB IV</b>	
	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
	<b>BAB V</b>	
	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	42
	<b>BAB VI</b>	
	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	47
	<b>BAB VII</b>	
	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	61
	<b>BAB VIII</b>	
	<b>PENUTUP</b>	64

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pembangunan Nasional dalam semangat desentralisasi dan reformasi saat ini, dan sebagai implikasinya telah menimbulkan berbagai perkembangan yang begitu cepat dan dampak yang begitu dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan yang demikian itu, maka tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas, percepatan dan pemenuhan pelayanan oleh pemerintah semakin meningkat, terutama kebutuhan akan penyediaan program dan kegiatan pembangunan yang menyentuh kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya seiring dengan perkembangan lingkungan, baik lingkungan regional maupun lingkungan global, dan dalam kaitannya dengan itu maka perencanaan yang integral dan komprehensif mutlak diperlukan.

Sebagai lembaga teknis yang diberi amanat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008, maka Dinas Pariwisata senantiasa dituntut untuk siap dengan langkah-langkah pembenahan diri serta arah kebijakan secara instansional yang berorientasi ke depan, guna menjawab dan mengakomodir tuntutan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata ini sangat diperlukan, sehingga dengan dokumen RENSTRA yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Bima ini, akan memberikan tuntunan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai pelaksana teknis kegiatan kepariwisataan dan

kepemudaan dan olahraga khususnya dalam periode 5 tahun ke depan (2018-2023).

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor );
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor );

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata (DISPAR) selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh unit organisasi dalam Dinas Pariwisata (DISPAR) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan dalam unit organisasi Dinas Pariwisata (DISPAR).
4. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata (DISPAR) baik Laporan Tahunan maupun Laporan Lima Tahunan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pariwisata Kota Bima adalah unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota Bima dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis ;
- b. Pemberian pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

##### **A. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja dinas,
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas,
  - c. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan,
  - d. Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja dinas,
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi Dinas;

- b. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan;
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

*B. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata*

1. Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam pembinaan, pengembangan, pemanfaatan obyek wisata, sarana dan prasarana sumber daya pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
  - b. Penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
  - c. Pelaksanaan administrasi Bidang pengembangan destinasi;
  - d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
  - e. Pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
  - f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
  - g. Koordinasi dan konsultasi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah atas pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata aset pemerintah daerah dan aset swasta;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Pengembangan Destinasi terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan objek daya tarik wisata.
- b. Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan, pengelolaan destinasi dan objek daya tarik wisata.
- c. Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian destinasi dan objek daya tarik wisata.

C. *Bidang Pemasaran Pariwisata.*

1. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar ekonomi kreatif dan pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
  - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
  - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreatif di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif

- pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan strategi pemasaran dan promosi.
  - b. Seksi Kerja sama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pariwisata.
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

#### *D. Bidang Ekonomi Kreatif*

1. Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program Ekonomi Kreatif dan Pengembangan SDM pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang DEkonomi Kreatif mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif
  - b. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif.
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif.
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.

- f. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.
- h. Dengan menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut, Bekraf optimistis bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efisien dan kondusif. Dengan begitu, para pelaku bisa berkarya lebih baik sehingga ekonomi kreatif bisa memberikan kontribusi pendapatan yang selalu meningkat terhadap PDB nasional.

#### *E. Bidang Kebudayaan*

1. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
  - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
  - c. Pelaksanaan pengembangan potensi bidang kebudayaan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan bidang kebudayaan;
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana program di Bidang Kebudayaan;
  - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan bidang kebudayaan;
  - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuman dan sarana prasarana;
  - d. Menyusun strategi pengembangan dan pelestarian kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuman dan sarana prasarana;
  - e. Mendorong terbentuknya kelompok organisasi kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
  - f. Menghimpun, menginventarisasi, dan memanfaatkan potensi tenaga dan sarana kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
  - g. Memonitor dan menilai kegiatan pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
  - h. Mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka pengembangan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
  - i. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuman dan sarana prasarana;

- j. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
- k. Mengelola pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pariwisata;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Perencanaan Ahli Muda;
  - c. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
    - (i) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    - (ii) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - b. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
    - (i) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - (ii) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - (iii) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - c. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
    - (i) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - (ii) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - (iii) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
    - (i) Pamong Budaya;
    - (ii) Pamong Budaya;
    - (iii) Pamong Budaya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Hingga Bulan Januari 2023, pegawai yang ada berjumlah 34 orang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
2.	S2	5	13,89%
3.	S1	22	61,11%
4.	Diploma 3	5	13,89%
5.	SMA / sederajat	3	8,33%
6.	SMP	1	2,78%
Total		34	100%

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	8	22,58%
2.	Golongan III	21	61,29%
3.	Golongan II	5	16,12%
4.	Golongan I	-	-
Total		34	100%

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2,94%
2.	Eselon III	5	14,71%
3.	Eselon IV	1	2,94%
4.	Non-Eselonering	27	79,41%
Total		34	100%

### 2.2.2. Sumberdaya Aset/Modal

Dinas Pariwisata Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Raba Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang belum ada sehingga tidak mendukung kelancaran operasional tugas kedinasan pun belum tercapai.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;

- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesin tik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya, Lembaga terkait non pemerintah, serta seluruh Stake Holders lain yang ada.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- 1) monitoring dan evaluasi,
- 2) melaksanakan perencanaan teknis kegiatan dinas,
- 3) mengadakan koordinasi dan kerjasama kepariwisataan, pemuda dan olahraga,
- 4) menyusun data statistik kunjungan, sarana dan prasarana pariwisata, pemuda dan olahraga kegiatan penunjang (akomodasi, transportasi, sanggar seni, tempat pertunjukan, kuliner serta situs budaya) sebagai penyedia informasi,
- 5) menyusun dokumen perencanaan pariwisata, pemuda dan olahraga,
- 6) mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan kepariwisataan, pemuda dan olahraga
- 7) Memprakarsai pembentukan kelompok dan asosiasi masyarakat dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga,
- 8) menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil kegiatan teknis kepariwisataan, pemuda dan olah raga.



Tabel 2.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20-)
1.	Persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke ODTW	10	10	10	10	10	10	10	10	180,77	58,70	-52,94	1.12		180,77	58,70	-52,94	1.12	
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	2	2	2	2	2	2	2	2	2,1	1,1	1,2	1,3		0,1	-1	0,1	1,3	
3.	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	11	11	11	11	11	11	11	11	50	100	0	-50		50	100	0	-50	

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Anggaran Tahun ke					Realisasi dari Tahun ke			Rata-rata pertumbuhan	
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	2022	5	1	2	3	4	5				Anggaran	Realisasi
(1)																(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	12.326.783.657	8.517.989.525	9.882.546.942	11.566.522.938		12.053.375.963	7.654.679.648	9.473.989.591	11.297.762.990											

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata (DISPAR) memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### 2.4.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kompetensi dan kualitas SDM yang masih rendah perlu di tingkatkan agar mampu merencana dan melaksanakan program secara maksimal.
- b. Pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu global seperti terorisme, bencana alam dan Hak azasi manusia.
- c. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial
- d. Berkembangnya inovasi dan kreatifitas atraksi destinasi wisata di luar kota Bima.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya disekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata;
- f. Belum maksimalnya pemasaran dan promosi di wilayah regional Nusa Tenggara Barat maupun seluruh Indonesia terlebih yang menjangkau wilayah luar negeri;
- g. Belum membudayanya kecintaan masyarakat akan Olah Raga membuat kurangnya prestasi yang didapat
- h. Belum maksimalnya pembinaan atlit-atlit dikarenakan masih minimnya anggaran yang tersedia.
- i. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- j. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan dan kegiatan tehnis pembangunan kepariwisataan, pemuda dan olah raga yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

### 2.4.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.

- b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
- e. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
- f. Topografi dan kontur wilayah yang berbukit dan di kelilingi garis pantai menjadikan Kota Bima memiliki potensi destinasi dan atraksi yang bagus untuk dikembangkan.
- g. Kota Bima yang tenang dan didukung keramah tamahan masyarakat merupakan modal bagi Kota Bima untuk membangun industri pariwisata;
- h. Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan akses jalan menuju lokasi wisata;
- i. Di bangunnya sarana dan prasarana olah raga oleh pemerintah daerah mulai dari lapangan mini sampai gelanggang olah raga (GOR) hingga menumbuhkan minat masyarakat untuk gemar berolah raga.

Analisis Renstra Kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah

No	Indikator kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke ODTW	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi relative stagnan	Sosialisasi RTRW
3.	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	Meningkatnya prestasi pemuda	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tanggungjawabnya terhadap kompleksitas pembangunan daerah yang semakin beragam, Dinas Pariwisata (DISPAR) Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;  
Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah, kekurangan dan keterbatasan data dan informasi perencanaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas Pariwisata Kota Bima.  
Dinas Pariwisata Kota Bima harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, *NGO*, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas Pariwisata Kota Bima.
3. Belum optimalnya pelayanan prima di bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima.  
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik di bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima, maka sudah tentu Dinas Pariwisata Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas Pariwisata Kota Bima.

4. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga Kota Bima.  
Keberadaan aparatur perencana khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Bima merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
5. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

#### 3.2.1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah :

**“Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri”.**

Visi tersebut diatas memiliki makna sebagai berikut :

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
- b. **SETARA** adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : ***menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan

Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.

Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Dispar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dispar menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga;
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga dan pelayanan umum dibidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga;
- d) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga;
- e) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- f) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- g) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- h) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- i) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- j) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- k) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- l) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga;
- m) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- n) pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
- o) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata Pemuda dan Olah raga; dan
- p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.2.2. Misi**

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

#### **Misi Pertama :**

***“ Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing”.***

Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan

#### **Misi Kedua :**

***“Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan”.***

Berdasarkan misi kedua WakilKota dan Wakil Walikota Bima terpilih ada 2 (dua) point yang perhatikan :

1. Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan

memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

2. Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;

**Misi Ketiga :**

***“Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”.***

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

**Misi Keempat :**

***“Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi”.***

Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.

Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana.

**Misi Kelima :**

***“Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais”.***

Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berikut disajikan beberapa isu strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, sebelum memasukan aspek politis dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal
  - a. Rata-rata lama sekolah masih rendah
  - b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi
  - c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai
  - d. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN
  - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah
  - f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa
  - g. Akses Pendidikan yang belum merata
  - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah
2. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
  - a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah
  - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
  - c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*
  - d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar
  - e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah
  - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal
  - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal
  - h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun
3. Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
  - a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi
  - b. Angka Setengah Pengangguran yang cukup tinggi
  - c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal
  - d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah

- e. Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial
  - f. Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)
  - g. Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal
- a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  - b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
  - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal
  - d. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat
  - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik
  - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal
  - g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan
  - h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan
5. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
- a. Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional
  - b. Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah
  - c. Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak
6. Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
- a. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal
  - b. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan
  - c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor
  - d. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata
  - e. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat
  - f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan
  - g. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah

- h. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang
  - i. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan
  - j. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal
  - k. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal
7. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
- a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal
  - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal
  - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal
  - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang
  - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal
  - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal
8. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal.
- a. Indeks Demokrasi masih rendah
  - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial
  - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal
  - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi
  - e. Potensi bencana relatif tinggi
9. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal
- a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun
  - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal
  - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut
  - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah
10. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal

- a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal
- b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai
- c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata
- d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
- e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata
- g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi

Tabel 3.3.1.

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bima sesuai dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
				Angka harapan lama sekolah
				Rata-rata nilai UN
				Angka kelulusan
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp)
Meningkatnya ketahanan pangan	Cadangan pangan (ton)			
	Skor pola pangan harapan			
Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB (%)
			Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Gini rasio
			Meningkatnya produktifitas sector pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industry kreatif	PDRB sector pertanian
				Jumlah kunjungan wisata (orang)
				Spending of money wisatawan
				PDRB sector perdagangan (juta)
				PDRB sector jasa
	PDRB sector industry			
	Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	Angka kemiskinan	Berkurangnya angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani (%)
			Meningkatnya kesempatan kerja	Partisipasi angkatan kerja
Angka pengangguran terbuka				
Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
				Skor LPPD
				Opini BPK
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	% PAD terhadap APBD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
pemerintahan yang baik			Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata skor IKM
Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
				Persentase luas RTH
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh (%)
				Persentase rumah layak huni
			Persentase rumah tangga berakses air minum layak	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase kemantapan jalan dan jembatan	
			Indeks konektivitas transportasi	
		Indeks ketangguhan bencana	Berkurangnya resiko bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Indeks ketentraman (angka konflik)	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani
			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya local	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari (%)
			Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Kota Bima didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Terdapat 6 (enam) substansi dalam RTRW Kota Bima, yaitu 1) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; 2) Rencana struktur ruang wilayah; 3) Rencana pola ruang wilayah; 4) Penetapan kawasan strategis; 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan 6) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dari 6 (enam) substansi tersebut, substansi yang berimplikasi langsung terhadap pengembangan wilayah adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; dan penetapan kawasan strategis kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Berdasarkan RTRW Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima merupakan simpul dari pertumbuhan Pulau Sumbawa bagian Timur yang memiliki *hinterland* wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1

#### Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
1.	penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya;	mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota;
		mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan;
		mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung
2.	pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional;	meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkaran luar Selatan dan lingkaran luar Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
		mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
		meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang berbasis moda jalan
		memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota
3.	peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan secara optimal;	mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan
		mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu
		membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah
		meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan kota tepian air (water front city
		merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota
		mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan
		meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan;
		mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarananya
4.	pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;	Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota
5.	pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan mendukung perkembangan wilayah kota	menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota
		memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota
		memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH
		menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai;
		melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindun
6.	pengecahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang	mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
		mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung
		menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
7.	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
		penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota
8.	perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai historis dan spiritual;	melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
		revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya loka
		merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;
		melarang kegiatan-kegiatan budidaya

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
		yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya
9.	pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;	menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana
		mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
		menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
		mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu
		meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana
		memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan
		mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam
10.	pengembangan kawasan budidaya	pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 16 kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.
11.	pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan
		menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
		mengembangkan sarana dan prasarana perumahan;
		mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai
12.	pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis	menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;

No.	Kebijakan	Startegi
(1)	(2)	(3)
	provinsi di wilayah kota	
		mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan local
		memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar
		menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. **Kualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan**

Tolak ukur penting dalam memotret pembangunan sumber daya manusia adalah tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu Strategis pada Bidang kesehatan meliputi:

- Kasus gizi buruk.
- Kesehatan Ibu hamil
- Kesehatan Ibu melahirkan
- Kesehatan Bayi
- Stunting
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten.
- Jangkauan pelayanan kesehatan oleh karena belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan BPJS
- Ketersediaan Rumah Sakit Rujukan
- Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
- Tata kelola layanan lembaga kesehatan

Isu Strategis pada bidang Pendidikan meliputi:

- Keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Penuntasan pendidikan dasar
- Kualitas pendidikan mencakup tenaga pendidik yang berkualitas, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta prestasi anak didik.
- Tata kelola layanan lembaga pendidikan

**b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Adapun isu strategis terkait dengan kemiskinan dan pengangguran meliputi:

- Akses terhadap sumber daya: modal, asset, teknologi
- Akses terhadap pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi layak
- Rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, anak telantar dan kelompok usia lanjut
- Tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan
- Kebijakan dan integrasi program *pro poor*
- Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- Kualitas tenaga kerja

Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki. Isu strategis terkait dengan pembangunan ekonomi mencakup:

- Pengembangan Industri Kecil Menengah
- Pemberdayaan UMKM

- Peningkatan produk unggulan daerah
- Ketahanan pangan
- Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
- Pengembangan jaringan pemasaran

**c. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup:

- Perencanaan kinerja yang berkualitas,
- Kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP
- Akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN
- Peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).
- Pengelolaan keuangan yang efisien, tertib dan akuntabel
- Keterbukaan Informasi Publik
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan

**d. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana**

Isu strategis pada aspek ini meliputi:

- Kemantapan jalan dan jembatan
- Pelayanan Air bersih
- Rumah tidak layak huni
- Kawasan kumuh
- Kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat
- Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana
- Ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana

**e. Eksistensi Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.**

Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjad motto pemerintah Kota Bima yaitu ***Maja Labo Dahu***. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anak-anaknya yang pergi merantau ke luar daerah.

*Maja Labo Dahu* diartikan sebagai Malu dan Takut (*Maja* = Malu; *Dahu* = Takut). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, *maja labo dahu* berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Isu strategis terkait dengan pembangunan masyarakat berkarakter dan agamais meliputi:

- Implementasi nilai-nilai *Maja Labo Dahu*
- Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai tradisi, adat budaya maupun benda cagar budaya
- Implementasi nilai-nilai dan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat
- Peran petugas keagamaan dan lembaga keagamaan
- Pusat kebudayaan islam dan *Islamic Centre*
- Penyalahgunaan Narkoba
- Tindakan kriminalitas

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah  
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan	Rendahnya daya saing obyek wisata	Obyek wisata belum ditata secara baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Akses menuju obyek wisata belum seluruhnya baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Kebersihan lingkungan obyek wisata masih sangat kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Sarana dan prasarana obyek wisata masih sangat minim	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Keamanan dan ketertiban	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Rendahnya upaya promosi pariwisata	Masih kurangnya kerjasama pengembangan pariwisata	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
			Festival dan atraksi pendukung pariwisata masih kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Organisasi pemuda yang aktif masih minim	Pembinaan dan pendampingan	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Jumlah wirausaha muda sangat minim	Pembinaan dan penguatan modal	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Pembinaan olahraga usia dini masih sangat minim	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Sudah tersedia tapi masih terbatas	Pelatihan dan uji sertifikasi	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Atlet berprestasi internasional	Pembinaan usia muda	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Bidang atletik dan volley pantai sudah berprestasi nasional dan internasional	Pembinaan usia muda	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi

**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
2.	Pelayanan data dan informasi	Belum optimal untuk bahan perencanaan	Anggaran dan sumber daya manusia	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public
3.	Pengendalian penataan ruang	Badan koordinasi penataan ruang daerah belum optimal dilaksanakan	Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal dan masih bersifat parsial	Anggaran	Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan	Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata	Anggaran dan mekanisme	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat	Anggaran dan sumber daya manusia yang masih kurang	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
2.	Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal	Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal	Anggaran dan pelaku industri belum maksimal	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang	Belum melakukan tatakelola yang baik	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi
		Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal	Masih kurang melaksanakan promosi	Komitmen kepala OPD untuk maksimal melaksanakan tupoksi

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari setiap misi, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil-hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan tersebut adalah:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke...				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Obyek Daya Tarik Wisata	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan ke ODTW tahun } n-(n-1)}{\text{Jumlah Kunjungan wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	10 %	10%	10%	10%	10%
				Rata-rata lama tinggal wisatawan	$\frac{\text{Lama menginap wisatawan}}{\text{Jumlah orang yang menginap}}$	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Pemuda dan Atlet	Meningkatnya partisipasi pemuda	Persentase Peningkatan pemuda berprestasi	$\frac{\text{Jumlah pemuda berprestasi tahun } n-(n-1)}{\text{Jumlah pemuda berprestasi tahun } n-1} \times 100\%$	11%	11%	11%	11%	11%

Adapun Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dimaksud di atas adalah ODTW yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ada di Kawasan Pantai Lawata. Tujuan dan sasaran dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ada persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke ODTW, yaitu mengukur peningkatan pengunjung yang datang ke ODTW Lawata. Rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu pengukuran rata-rata lama menginap wisatawan yang berkunjung di hotel dan penginapan lainnya. Dan yang terakhir adalah persentase peningkatan pemuda berprestasi yaitu mengukur peningkatan pemuda yang berprestasi di tingkat propinsi dan nasional setiap tahunnya.

## 4.2. Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya mencapai **VISI** dan **MISI** Pemerintah Kota Bima maka ditetapkan beberapa **TUJUAN** pembangunan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan

Sedangkan **SASARAN** yang akan dicapai dalam mencapai Tujuan :

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah dengan format tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	persentase peningkatan kunjungan wisatawan
2	Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda berprestasi

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah, mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan.

Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

1. **Perspektif Masyarakat/Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi

2. **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
3. **Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
4. **Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri								
Misi : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan daya tarik wisata	Peningkatan sarana dan prasarana dan revitalisasi serta penataan kawasan destinasi wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	Mengembangkan atraksi budaya dan ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Meningkatkan kerjasama dan promosi pariwisata
2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya pemuda prestasi olahraga	Peningkatan prestasi pemuda olahraga	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih	Meningkatkan peran pemuda dalam wirausaha, pembinaan atlet muda, cabang olahraga serta jumlah prestasi olahraga dan pelatih yang bersertifikasi yang diraih

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Secara rinci kerangka pendanaan dan program perangkat daerah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bima

(jutaan rupiah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasar an program dan kegiatan	Data capaian pd thn awal perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata</b>	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>	<b>15</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>Persentase pelaksanaan promosi pemasaran industri pariwisata</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>1.405</b>	<b>25%</b>	<b>1.500</b>	<b>25%</b>	<b>1.550</b>	<b>26%</b>	<b>1.700</b>	<b>26%</b>	<b>1.725</b>	<b>26%</b>	<b>1.725</b>	<b>Kabid pemasaran pariwisata &amp; ekonomi kreatif</b>	<b>Kota Bima</b>
		15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah kerjasama teknologi informasi wisatawan	3 media	3 media	0	3 media	300	3 media	330	3 media	363	3 media	410	3 media	410	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama promosi wisatawan	3 kali	3 kali	4	3 kali	210	3 kali	231	3 kali	254	3 kali	300	3 kali	300	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sector	4 kali	4 kali	50	4 kali	150	4 kali	165	4 kali	181	4 kali	210	4 kali	210	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah media promosi	3 media	3 media	376	3 media	1.000	3 media	1.100	3 media	1.210	3 media	1.431	3 media	1.431	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.06	Pemantauan	jumlah	4 kali	4 kali	0	4 kali	50	4 kali	55	4 kali	60	4 kali	70	4 kali	70	Kasi	Kota

			dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	evaluasi pelaksanaan														penguatan strategi pemasaran & promosi	Bima
		15.10	MICE	Jumlah laporan kegiatan	1 keg.	1 keg.	183	1 keg.	300	1 keg.	330	1 keg.	363	1 keg.	410	1 keg.	410	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.11	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	Jumlah partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya	2 keg.	2 keg.	789	2 keg.	2.000	2 keg.	2.200	2 keg.	2.420	2 keg.	2.762	2 keg.	2.762	Kasi penguatan strategi pemasaran & promosi	Kota Bima
		15.12	Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	Jumlah festival atraksi kesenian tradisional	1 keg.	1 keg.	244	1 keg.	1.000	1 keg.	1.100	1 keg.	1.210	1 keg.	1.431	1 keg.	1.431	Kasi kerjasama pariwisata	Kota Bima
		<b>20</b>	<b>Program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif</b>	<b>Jumlah ekonomi kreatif</b>	<b>1.016 ush</b>	<b>1.016 ush</b>	<b>200</b>	<b>1.016 ush</b>	<b>225</b>	<b>1.050 ush</b>	<b>250</b>	<b>1.075 ush</b>	<b>300</b>	<b>1.100 ush</b>	<b>370</b>	<b>1.100 ush</b>	<b>370</b>	<b>Kabid pemasaran pariwisata &amp; ekonomi kreatif</b>	<b>Kota Bima</b>
		20.01	Penyusunan data base ekonomi kreatif	Jumlah data base ekonomi kreatif	1 dok.	1 dok.	111	1 dok.	37	1 dok.	41	1 dok.	45	1 dok.	51	1 dok.	51	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.02	Car free day	Jumlah kegiatan	4 keg.	4 keg.	57	4 keg.	108	4 keg.	119	4 keg.	130	4 keg.	144	4 keg.	144	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima

		20.03	Event ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan	7 keg.	7 keg.	0	7 keg.	350	7 keg.	385	7 keg.	423	7 keg.	465	7 keg.	465	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.04	Pameran / gebyar ekonomi kreatif	Jumlah karya yang dipamerkan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	250	1 keg.	275	1 keg.	302	1 keg.	332	1 keg.	332	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.05	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif	5 unit	5 unit	0	5 unit	1.000	5 unit	1.100	5 unit	1.210	5 unit	1.331	5 unit	1.331	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.06	Pelatihan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan	60 org	60 org	0	60 org	300	60 org	330	60 org	363	60 org	410	60 org	410	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.07	Khasanah ramadhan	Jumlah karya yang dipasarkan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	200	1 keg.	220	1 keg.	242	1 keg.	286	1 keg.	286	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		20.08	Forum grup diskusi (FGD) ekonomi kreatif	Jumlah peserta diskusi	6 keg.	6 keg.	0	6 keg.	150	6 keg.	165	6 keg.	181	6 keg.	210	6 keg.	210	Kasi ekonomi kreatif	Kota Bima
		16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>Persentase pengembangan destinasi ODTW</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>5.119</b>	<b>50%</b>	<b>5.500</b>	<b>50%</b>	<b>6.000</b>	<b>55%</b>	<b>6.500</b>	<b>55%</b>	<b>7.000</b>	<b>55%</b>	<b>7.000</b>	<b>Kabid pengembangan destinasi</b>	<b>Kota Bima</b>
		16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata	3 lokasi	3 lokasi	571	3 lokasi	15.500	3 lokasi	5.50	3 lokasi	7.50	3 lokasi	7.50	3 lokasi	7.50	Kasi pengembangan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia	Jumlah Laporan Kegiatan	1 dok	1 dok	15	1 dok	150	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	150	1 dok	150	Kasi pengembangan destinasi & ODTW	Kota Bima

			usaha																
		16.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	8 gedung	8 gedung	2.493	8 gedung	20.000	8 gedung	3.200	8 gedung	3.420	8 gedung	4.000	8 gedung	4.000	Kasi pengembangan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.09	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	Database Pariwisata	1 dok	1 dok	0	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	150	1 dok	150	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.10	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Jumlah kegiatan pemeliharaan atraksi, destinasi dan ODTW	3 keg.	3 keg.	71	3 keg.	500	3 keg.	332	3 keg.	445	3 keg.	500	3 keg.	600	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.11	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	Jumlah koordinasi di sektor pariwisata, pengelolaan destinasi dan ODTW	4 kali	4 kali	13	4 kali	100	4 kali	110	4 kali	121	4 kali	150	4 kali	150	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.12	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	Jumlah kunjungan wisatawan	44123 org	44123 org	87	45291 org	800	47472 org	250	52731 org	270	57671 org	300	57671 org	350	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.13	MONEV Perencanaan dan Pembangunan Destinasi, ODTW dan Kawasan	Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi ODTW	4 kali	4 kali	70	4 kali	150	5 kali	150	5 kali	160	5 kali	180	5 kali	200	Kasi pengendalian destinasi & ODTW	Kota Bima
		16.14	Pembangunan sarana	Jumlah pembangunan	8 keg.	8 keg.	0	8 keg.	1.500	8 keg.	1.650	8 keg.	1.815	8 keg.	1.996	8 keg.	2.000	Kasi pemel, pengelolaan	Kota Bima

			penunjang dan utilitas	an sarana penunjang dan utilitas pariwisata														destinasi & ODTW	
		16.15	Kerjasama peningkatan SDM pengelola Kawasan, Destinasi dan ODTW serta atraksi dengan instansi dan stakeholders terkait	Jumlah kerjasama dan SDM/Stakeholders pengelola Kawasan, Destinasi, ODTW maupun atraksi	4 keg.	4 keg.	0	4 keg.	350	4 keg.	220	4 keg.	242	4 keg.	270	4 keg.	280	Kasi pemel, pengelolaan destinasi & ODTW	Kota Bima
		17	<b>Program pengembangan industry dan kemitraan pariwisata</b>	<b>Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata</b>	<b>10 ush</b>	<b>10 ush</b>	<b>59</b>	<b>10 ush</b>	<b>100</b>	<b>10 ush</b>	<b>150</b>	<b>10 ush</b>	<b>200</b>	<b>10 ush</b>	<b>250</b>	<b>10 ush</b>	<b>250</b>	<b>Kabid pengembangan industry &amp; kelembagaan pariwisata</b>	<b>Kota Bima</b>
		17.01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah informasi dan database pariwisata	2 dok	2 dok	8	2 dok	9	2 dok	10	2 dok	11	2 dok	12	2 dok	12	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata	2 lbg	2 lbg	32	2 lbg	125	2 lbg	137	2 lbg	151	2 lbg	166	2 lbg	200	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.5	Forum grup diskusi (FGD) HPI	Jumlah pelaksanaan forum diskusi	2 kali	2 kali	0	2 kali	50	2 kali	55	2 kali	60	2 kali	75	2 kali	85	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.06	Penyusunan data base dan program	Jumlah data industri jasa	2 dok	2 dok	0	2 dok	50	2 dok	55	2 dok	60	2 dok	75	2 dok	85	Kasi pengembangan industry	Kota Bima

			usaha industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata	pariwisata														pariwisata	
		17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pokdarwis	8 klp	8 klp	0	8 klp	55	8 klp	60	8 klp	66	8 klp	83	8 klp	93	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha dan industri jasa pariwisata lembaga dan mitra pariwisata	Jumlah monitoring, evaluasi lembaga serta mitra pariwisata	4 kali	4 kali	17	4 kali	45	4 kali	49	4 kali	54	4 kali	69	4 kali	69	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		17.10	Koordinasi Dengan Sektor Pariwisata tentang Pelatihan pemandu wisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sektor (Sppd dalam daerah dan Luar daerah)	4 kali	4 kali	0	4 kali	75	4 kali	82	4 kali	90	4 kali	120	4 kali	120	Kasi pengembangan industry pariwisata	Kota Bima
		18	<b>Program pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan</b>	<b>Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata</b>	<b>10 lokasi</b>	<b>10 lks</b>	<b>552</b>	<b>10 lks</b>	<b>600</b>	<b>10 lks</b>	<b>650</b>	<b>10 lks</b>	<b>700</b>	<b>10 lks</b>	<b>750</b>	<b>10 lks</b>	<b>750</b>	<b>Kabid pengembangan industry &amp; kelembagaan pariwisata</b>	<b>Kota Bima</b>
		18.01	Pengembangan SDM bidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga	Jumlah lembaga pariwisata	5 lbg	5 lbg	0	5 lbg	200	5 lbg	220	5 lbg	242	5 lbg	276	5 lbg	286	Kasi pengembangan SDM	Kota Bima

			lainnya																
		18.02	Pengembangan SDM dan BIMTEK profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah kegiatan	6 keg.	6 keg.	552	6 keg.	200	6 keg.	500	Kasi pengembangan SDM	Kota Bima						
		<b>19</b>	<b>Program pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata</b>	<b>Jumlah lembaga kepariwisataan</b>	<b>10 lbg</b>	<b>10 lbg</b>	<b>41</b>	<b>10 lbg</b>	<b>75</b>	<b>10 lbg</b>	<b>100</b>	<b>10 lbg</b>	<b>150</b>	<b>10 lbg</b>	<b>200</b>	<b>10 lbg</b>	<b>200</b>	<b>Kabid pengembangan industry &amp; kelembagaan pariwisata</b>	<b>Kota Bima</b>
		19.03	Penerbitan rekomendasi ijin usaha pariwisata, lembaga kepariwisataan dan rekomendasi ijin pemandu wisata	Jumlah rekomendasi ijin pemandu wisata	10 ijin	10 ijin	0	10 ijin	54	10 ijin	59	10 ijin	65	10 ijin	71	10 ijin	71	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.04	Standarisasi dan sertifikasi segala bentuk usaha dan industri jasa pariwisata	Persentase standarisasi bentuk usaha industri jasa pariwisata	50%	50%	0	50%	75	50%	82	50%	90	50%	99	50%	99	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.05	Fasilitasi dan pendampingan serta pembentukan kelompok masyarakat dan mitra	Jumlah pokdarwis	10 klp	10 klp	41	10 klp	150	10 klp	165	10 klp	181	10 klp	210	10 klp	210	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.06	Lomba pokdarwis Kota Bima	Jumlah pokdarwis	10 klp	10 klp	0	10 klp	85	10 klp	93	10 klp	102	10 klp	113	10 klp	113	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima

		19.07	Studi banding desa wisata	Jumlah dokumen study banding	1 dok	1 dok	0	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	121	1 dok	133	1 dok	133	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
		19.08	Pelaksanaan kegiatan festival bersih pantai	Jumlah pantai yang telah bersih	2 lokasi	2 lokasi	0	2 lokasi	50	2 lokasi	55	2 lokasi	60	2 lokasi	66	2 lokasi	66	Kasi kelembagaan pariwisata	Kota Bima
<b>Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan</b>	<b>Meningkatnya prestasi olahraga</b>	<b>16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>jumlah pemuda pelopor</b>	<b>38 org</b>	<b>38 org</b>	<b>656</b>	<b>38 org</b>	<b>700</b>	<b>38 org</b>	<b>750</b>	<b>38 org</b>	<b>800</b>	<b>38 org</b>	<b>850</b>	<b>38 org</b>	<b>850</b>	<b>Kabid pemuda &amp; olahraga</b>	<b>Kota Bima</b>
		16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	75%	75%	650	75%	720	75%	792	75%	871	75%	958	75%	958	Kasi pembinaan kepemudaan	Kota Bima
		<b>20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Jumlah cabor yang ikut</b>	<b>47 cbr</b>	<b>47 cbr</b>	<b>159</b>	<b>47 cbr</b>	<b>200</b>	<b>47 cbr</b>	<b>250</b>	<b>47 cbr</b>	<b>300</b>	<b>47 cbr</b>	<b>350</b>	<b>47 cbr</b>	<b>350</b>	<b>Kabid pemuda &amp; olahraga</b>	<b>Kota Bima</b>
		20.02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah olahragawan /atletik unggulan	20 org	20 org	123	20 org	135	20 org	149	20 org	164	20 org	180	20 org	180	Kasi pembinaan keolahragaan	Kota Bima
		20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah olahragawan /atletik yang kita bina	20 org	20 org	35	20 org	40	20 org	44	20 org	48	20 org	63	20 org	73	Kasi pembinaan keolahragaan	Kota Bima

		20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabor yang menjalankan kompetisi secara teratur	5 cabor	5 cabor	0	5 cabor	208	5 cabor	229	5 cabor	252	5 cabor	400	5 cabor	400	Kasi pembinaan keolahragaan	Kota Bima
		<b>21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>Porsentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>41</b>	<b>25%</b>	<b>75</b>	<b>25%</b>	<b>1.500</b>	<b>25%</b>	<b>2.000</b>	<b>25%</b>	<b>2.500</b>	<b>25%</b>	<b>2.500</b>	<b>Kabid pemuda &amp; olahraga</b>	<b>Kota Bima</b>
		21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	1 gedung	1 gedung	883	2 gedung	971	1 gedung	1.069	1 gedung	1.175	1 gedung	1.700	1 gedung	1.800	Kasi prasarana & sarana kepemudaan & olahraga	Kota Bima
		21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga	4 kali	4 kali	17	4 kali	19	4 kali	21	4 kali	23	4 kali	35	4 kali	40	Kasi prasarana & sarana kepemudaan & olahraga	Kota Bima
		<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>744</b>	<b>100%</b>	<b>750</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>825</b>	<b>100%</b>	<b>850</b>	<b>100%</b>	<b>850</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kota Bima</b>
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	30 org	30 org	84	30 org	360	30 org	360	30 org	360	30 org	360	30 org	360	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	21	12 bln	150	12 bln	150	12 bln	150	12 bln	150	12 bln	150	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.06	Penyediaan jasa	Jumlah kendaraan	10 unit	10	22	10	24,750	10	27	10	35	10	45	10	60	Kasubag umum &	Kota Bima

			pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	dispar		unit		unit		unit		unit		unit		unit		kepegawaian	
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	6 org	6 org	45	6 org	49,750	6 org	54	6 org	60	6 org	70	6 org	80	Kasubag Keuangan	Kota Bima
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	42 jenis	42 jenis	54	42 jenis	81,770	42 jenis	89	42 jenis	98	42 jenis	108	42 jenis	108	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan karcis	100 blok	100 blok	39	500 blok	50	500 blok	47	500 blok	52	500 blok	57	500 blok	57	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor	35 peralatan	35 peralatan	66	35 peralatan	73	35 peralatan	80	35 peralatan	88	35 peralatan	110	35 peralatan	120	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak	4 media	4 media	28	4 media	30	4 media	33	4 media	37	4 media	40	4 media	40	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat	12 kali	12 kali	14	12 kali	15	12 kali	25	12 kali	25	12 kali	35	12 kali	40	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 kali	12 kali	245	12 kali	500	12 kali	296	12 kali	326	12 kali	359	12 kali	359	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam	12 kali	12 kali	0	12 kali	25	12 kali	35	12 kali	40	12 kali	40	12 kali	45	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima

				daerah															
		<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>79</b>	<b>80%</b>	<b>100</b>	<b>80%</b>	<b>150</b>	<b>80%</b>	<b>200</b>	<b>80%</b>	<b>250</b>	<b>80%</b>	<b>250</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kota Bima</b>
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	4 unit	4 unit	0	4 unit	100	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima								
		02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	1 pkt	1 pkt	0	1 pkt	50	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima								
		02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	10	1 lokasi	800	1 lokasi	200	1 lokasi	100	1 lokasi	100	1 lokasi	100	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dispar	10 unit	10 unit	43	10 unit	52	10 unit	52	10 unit	57	10 unit	63	10 unit	63	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	25 peralatan	25 peralatan	21	25 peralatan	30	25 peralatan	25	25 peralatan	28	25 peralatan	30	25 peralatan	30	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah disiplin aparatur</b>	<b>1 thn</b>	<b>1 thn</b>	<b>0</b>	<b>1 thn</b>	<b>50</b>	<b>1 thn</b>	<b>75</b>	<b>1 thn</b>	<b>100</b>	<b>1 thn</b>	<b>125</b>	<b>1 thn</b>	<b>125</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kota Bima</b>
		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah kegiatan	1 keg.	1 keg.	0	1 keg.	50	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima								
		<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pendidikan</b>	<b>1 kali</b>	<b>1 kali</b>	<b>0</b>	<b>1 kali</b>	<b>50</b>	<b>1 kali</b>	<b>75</b>	<b>1 kali</b>	<b>100</b>	<b>1 kali</b>	<b>125</b>	<b>1 kali</b>	<b>125</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kota Bima</b>

			<b>Aparatur dan pelatihan</b>																
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan	4 kali	4 kali	0	4 kali	55	4 kali	55	4 kali	60	4 kali	66	4 kali	66	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		05.05	Penyusunan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	0	1 kali	66	1 kali	66	1 kali	72	1 kali	79	1 kali	79	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		05.06	Konsultasi dan Studi Banding	Jumlah konsultasi dilaksanakan	4 kali	4 kali	0	4 kali	82	4 kali	82	4 kali	90	4 kali	99	4 kali	99	Kasubag umum & kepegawaian	Kota Bima
		06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>205</b>	<b>100%</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>	<b>275</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kota Bima</b>
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang harus disediakan	4 dok	4 dok	69	4 dok	50	4 dok	83	4 dok	92	4 dok	101	4 dok	101	Kasubag keuangan	Kota Bima
		06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester	2 dok	2 dok	45	2 dok	54	2 dok	54	2 dok	60	2 dok	66	2 dok	66	Kasubag keuangan	Kota Bima
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	14	1 dok	17	1 dok	17	1 dok	18	1 dok	20	1 dok	20	Kasubag keuangan	Kota Bima
		06.05	Penyusunan rencana kerja	Jumlah dokumen	3 dok	3 dok	51	3 dok	62	3 dok	62	3 dok	68	3 dok	75	3 dok	75	Kasubag Perencanaan	Kota Bima

			tahunan/RKA/ DPA satuan kerja perangkat daerah	rencana kerja tahunan RKA/DPA satuan kerja															
		06.06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 dok	3 dok	39	3 dok	47	3 dok	47	3 dok	52	3 dok	57	3 dok	57	Kasubag Perencanaan	Kota Bima

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 7.1, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 7.2.

Table tersebut diatas tertuang pada lampiran berikut.

**Tabel 7.1****Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Bima**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target capaian setiap tahun					Kondisi Akhir (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke ODTW	10 %	10 %	10%	10%	10%	10%	10 %
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
3.	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%

## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2018-2023 ini merupakan rencana kerja lima tahunan yang disusun untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih masa periode 2018-2023.

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Bima merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Bima, APBD Propinsi dan APBN, yang diimplemetasikan dalam program dan kegiatan pelaksanaan selama lima tahun kedepan.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bima lima tahunan ini, maka akan merefleksikan rencana strategis prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima, sehingga diharapkan akan lebih terkoordinir, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Propinsi dan Kementerian/Lembaga.



Pt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima

**Drs. H. SUKRI, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip: 19620706 198602 2 007

